

DISFUNGSIONALITAS PARTAI POLITIK PENYEBAB ADANYA KOTAK KOSONG: PEMILIHAN KEPALA DAERAH SURABAYA TAHUN 2024

¹Elvina Maslukha Ramadhania

elvina.maslukha.ramadhania-2024@fisip.unair.ac.id

Received: 07-05-2025

Revised: 19-05-2026

Accepted: 29-06-2026

Abstract

In running a democratic country, political parties are essential, provided they carry out their duties and functions properly. Various forms of misconduct occur when political parties fail to fulfill their duties and functions, whether in electoral matters or other areas. The establishment of a political party is also accompanied by an inherent ideology that distinguishes it from other parties. A phenomenon observed during the 2024 Surabaya mayoral election revealed an anomaly in political party practices: the presence of a single candidate who had the full support of 18 political parties. This single candidate an incumbent, clearly held an advantage in every respect. This phenomenon demonstrates that political parties tend to play it safe and form coalitions simultaneously, resulting in a lack of opposition to the sole candidate. The presence of a blank ballot creates injustice in an election which is the public's right to choose their leader. The absence of opposition in electoral politics can undermine democratic values in the long term.

Keywords: Political Parties, Blank Boxes, Democracy

Abstrak

Dalam menjalankan negara demokrasi tentu harus memiliki partai politik, tentunya dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar. Berbagai macam penyimpangan terjadi karena partai politik tidak menjalankan tugas dan fungsinya, baik dalam aspek elektoral ataupun yang lainnya. Mendirikan partai politik juga diiringi dengan adanya ideologi yang melekat serta menjadi pembeda dengan partai lain. Fenomena yang terjadi ketika pelaksanaan Pilkada 2024 Kota Surabaya memperlihatkan kejanggalan dalam praktik partai politik

¹ Universitas Airlangga, Surabaya

yaitu adanya calon tunggal yang memiliki dukungan penuh dari 18 partai politik. Didukung dengan calon Tunggal yang merupakan seorang petahana yang jelas memiliki keunggulan dalam segala aspek. Fenomena ini memperlihatkan bahwa partai politik cenderung mencari aman dan melakukan koalisi secara bersamaan sehingga tidak adanya perlawanan terhadap calon tunggal. Kehadiran kotak kosong menghadirkan ketidakadilan dalam pemilihan yang merupakan hak masyarakat untuk memiliki pemimpin. Tidak adanya perlawanan dalam praktik politik elektoral dapat mencederai nilai-nilai demokrasi secara jangka panjang.

Kata Kunci: Partai Politik, Kotak Kosong, Demokrasi

PENDAHULUAN

Kotak kosong merupakan fenomena politik elektoral yang muncul pada saat pemilihan, dimana pencalonan hanya ada satu pasangan tanpa adanya lawan. Hal ini menyebabkan pada saat pemilihan tidak akan ada perlawanan karena melawan 'kotak kosong'. Fenomena ini memiliki dampak terhadap degradasi demokrasi dalam suatu negara, dimana sangat mempengaruhi indeks demokrasi. Ketika melihat fenomena kotak kosong ini tentu menuju pada partai politik yang tidak menjalankan tugasnya, baik dalam pengembangan anggota partai hingga pencalonan kader partai. Padahal partai politik memiliki 7 fungsi yaitu menjalankan sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik². Sehingga dapat terlihat sangat jelas bahwa kehadiran kotak kosong dikarenakan oleh disfungsi partai politik.

² Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik* (D. Herfan & A. Fajar (eds.); 10th ed.). PT Grasindo

Disfungsi partai politik merupakan kondisi yang sangat menentang atau bersifat negatif dari teori partai politik yang ada. Menggunakan pemahaman Giovanni Sartori mengenai partai politik dikatakan bahwa kehadiran partai politik dalam sistem pemerintahan yang demokratis diwajibkan untuk bersaing atau dapat menghadirkan persaingan partai politik yang bermakna. Hal ini disebut dengan istilah interaksi antara partai politik atau dapat diartikan sebagai sistem kepartaian dihasilkan dari adanya persaingan antarpolitical³. Sehingga fenomena disfungsi partai politik dalam Pilkada Serentak 2024 menjadi pertanda bahwa partai politik tidak lagi berjalan seperti yang seharusnya menjalankan fungsinya. Legitimasi partai politik di Indonesia perlu dipertanyakan kembali karena prinsip dari pemilihan umum yaitu tidak lagi pada aspek “LUBER JURDIL” tetapi pemilu yang terintegrasi.

Kehadiran kotak kosong di Indonesia diperkuat dengan adanya aturan yang mendukung, hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan MK (2015) dan UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 54C ayat (1): Jika hanya ada satu pasangan calon, maka pemilihan tetap dilanjutkan dan pemilih diberikan dua opsi: memilih pasangan calon, atau memilih kolom kosong.

Sehingga kehadiran kotak kosong ini diakibatkan dengan adanya aturan negara yang membolehkan adanya calon Tunggal, meskipun jika dilihat mendalam hal ini dapat merusak demokrasi dan mempertanyakan pemilu yang terintegrasi. Adapun fenomena

³ Sartori, G. (1977). Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. In *The Western Political Quarterly* (Vol.30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/447948>

pada Pilkada Serentak tahun 2024 di Surabaya yang menjadi fokus dari penelitian ini, ketika hadirnya calon tunggal yang diusung 18 partai politik (keseluruhan partai politik). Ketika melihat fenomena seperti ini tentu langsung tertuju pada soliditas partai politik yang sangat solid ketika mengusung calon kepala daerah Kota Surabaya yaitu Eri Cahyadi-Armudji (Eri-Armuji). Hal ini menjadi fenomena baru di Surabaya ketika adanya calon tunggal yang didukung penuh oleh 18 partai politik⁴, sehingga hal yang perlu dipertanyakan adalah pada kesolid-an partai politik yang tidak bersaing seperti yang seharusnya. Dalam memahami fenomena ini maka yang diteliti ialah pada partai politik yang tidak menjalankan fungsi-fungsinya atau disebut dengan istilah disfungsi partai politik.

Kehadiran kotak kosong di Pilkada Serentak 2024 Kota Surabaya memang tidak memenangkan pemilihan, akan tetapi berdampak jangka panjang yaitu masyarakat Surabaya berpikiran bahwa pemilihan tidak perlu bersaing. Adapun faktor lainnya pada pemenangan Eri-Armuji dikarenakan dengan tingginya pemilih dan tidak ada pasangan calon atau pilihan yang lain⁵. Adanya kotak kosong ini perlu diperhatikan dari sisi tidak adanya perlawanan partai politik lain yang mengusung para kadernya dalam bersaing atau fenomena ini dapat dikatakan sebagai adanya soliditas partai politik

⁴ Widiyana, E. (2024). *Eri-Armuji Resmi Daftar Pilwalkot Surabaya, Didukung 18 Parpol*. DetikNews. <https://news.detik.com/pilkada/d-7512915/eri-armuji-resmi-daftar-pilwalkot-surabaya-didukung-18-parpol>

⁵ Setiawan, A. D., & Hartik, A. (2024). *Semua Partai Dukung Eri-Armuji, Pakar: Pilkada Surabaya "Selesai"*. DetikNews. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/09/02/124433678/semua-partai-dukung-eri-armuji-pakar-pilkada-surabaya-selesai>

dalam mengusung pasangan calon Eri-Armuji. Penyebab lain dalam tidak adanya persaingan dalam Pilkada Serentak 2024 di Surabaya yaitu pada pasangan calon yang berstatus sebagai *incumbent* atau petahana. Petahana memang memiliki kekuatan yang hampir mutlak dalam memenangkan pemilihan karena memiliki berbagai macam keuntungan dan yang terutama pada masa kepengurusan sebelumnya dengan kebijakan yang telah dihasilkan untuk masyarakat⁶.

Seorang petahana memiliki keuntungan tertentu yang dapat mempengaruhi kemenangan ketika mencalonkan dirinya kembali. Melihat pasangan calon Eri-Armuji mereka memang berstatus sebagai petahana yang telah memiliki kebijakan-kebijakan untuk masyarakat Surabaya pada kepengurusan sebelumnya. Hal ini juga didukung dengan partai pengusungnya yang memiliki *tagline* “wong cilik” yaitu PDI-P, sehingga strategi-strateginya selalu melibatkan masyarakat kecil. Alasan ini bisa menjadi salah satu rasionalisasi pemenangan pasangan calon Eri-Armuji tetapi yang menjadi *gap* yaitu pada dukungan penuh 18 partai politik sehingga mempertanyakan pada kelembagaan partai politik selain PDI-P⁷.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini melihat mengenai konstruksi disfungsi partai politik dalam Pilkada Serentak 2024 di

⁶ Irwanto, D., & Harirah MS, Z. (2023). Petahana vs Penantang: Studi Perbandingan Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2020. *Journal of Political Issues*, 4(2), 108–119. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.88>

⁷ Jamil, D., Maksum, A., Sopyan, A. R., & Huda, A. (2024). Pelembagaan Partai Politik: Studi Kasus Partai Koalisi Incumbent Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada. *Jurnal Dinamika*, 5(1), 45–62. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v5i1.45-62>

Kota Surabaya yang timbul karena adanya dukungan penuh 18 partai politik baik yang mendapatkan kursi elektoral dan tidak serta menimbulkan kotak kosong. Penelitian ini melihat dari dua sisi yaitu pada masyarakat, baik yang mendukung atau memilih pasangan calon Eri-Armuji dan yang memilih kotak kosong. Sisi selanjutnya tentu pada partai politik yang memberikan dukungan penuh dalam mendukung Eri-Armuji, dengan melihat sudut pandang kader-kader partai politik selain PDI-P.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat fenomena soliditas partai politik di Surabaya dalam Pilkada Serentak 2024 yang menyebabkan hadirnya kotak kosong. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena bertujuan dalam menggali dan memahami tentang fenomena pengusungan calon Eri-Armuji yang melawan kotak kosong. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui konstruksi kotak kosong yang diakibatkan oleh soliditas partai politik di Surabaya. Metode kualitatif ini dirancang dalam memahami bagaimana narasi-narasi tertentu terbentuk dalam konteks fenomena tertentu⁸.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari internet yang diakses melalui berbagai macam sumber digital, seperti platform berita *online*, jurnal penelitian, dokumen pendukung. Penelitian berbasis internet ini memungkinkan peneliti dalam menangkap konteks yang lebih luas dari diskusi politik dan narasi kebencian yang muncul,

⁸ Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

karena internet telah menyediakan berbagai akses ke platform media sosial, forum *online* atau situs berita, sehingga dinamika, pola dan faktor yang memengaruhi diskusi tersebut dapat dipahami lebih dalam.

Melalui metode yang digunakan maka akan menghasilkan penjelasan deskriptif mengenai fenomena pengusungan calon Eri-Armuji sebagai Walikota-Wakil Walikota yang didukung penuh oleh 18 partai politik secara keseluruhan, sehingga meniadakan persaingan elektoral. Dengan ini nantinya menjelaskan adanya dinamika disfungsi partai politik di Surabaya. Selain itu, juga menjelaskan mengenai dampak yang terjadi atas terjadinya fenomena ini terhadap demokrasi lokal yang mengalami degradasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Pencalonan Eri Cahyadi dan Armuji dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Kota Surabaya tahun 2024 terdapat fenomena yang mengganjal yaitu tidak ada persaingan antar partai. Para partai politik ini memiliki solidaritas sangat tinggi hanya untuk mengusung satu pasangan calon tanpa ada pasangan calon yang lainnya. Meskipun secara aturan adanya calon tunggal diperbolehkan, tetapi dalam fenomena ini yang menjadi perhatian yaitu tidak adanya persaingan antar partai politik dan seluruh partai politik mendukung sepenuhnya pada pasangan calon Eri-Armuji.

Melihat pada masa pencalonan terdapat nama lain yang direncanakan akan maju melawan pasangan Eri-Armuji, akan tetapi

nama-nama tersebut tidak terlihat ketika hari pendaftaran ke KPU. Adanya nama lain yang muncul dipermukaan masyarakat Surabaya saat masa pencalonan yaitu terdapat dari partai Gerindra dan Golkar yaitu pasangan calon Ahmad Dhani dan Bayu Airlangga. Adapun nama-nama calon yang lain seperti Hendro Gunawan sebagai mantan Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendy Setiono seorang pengusaha, Hadi Dediansyah sebagai kandidat dari partai Gerindra, Arif Fathoni sebagai kandidat dari partai Golkar⁹.

Ketika nama-nama tersebut telah muncul di permukaan dan memang di gadang akan maju melawan calon pasangan petahana Eri-Armuji dalam survei elektabilitas, akan tetapi yang menjadi perhatian yaitu pada pendaftaran tanggal 28 Agustus 2024 yang mendaftar hanya pasangan Eri-Armuji dengan dukungan 18 partai politik secara keseluruhan. Sehingga pasangan calon Eri-Armuji ditetapkan sebagai calon tunggal dan melawan kotak kosong pada pemilihan. Hasil menunjukkan kemenangan berada pada Eri-Armuji sebesar 83,93% dari suara dan 16,7% dari suara memilih kotak kosong¹⁰.

Kemenangan ini tentu perlu dipertanyakan mengingat pasangan Eri-Armuji mendapat dukungan penuh dari 18 partai politik dan pada masa pencalonan terdapat nama-nama lain yang

⁹ Azmi, F. (2024). *Simulasi Pilwali Surabaya: Eri-Armuji 39,7%, Ahmad Dhani-Bayu Airlangga 28,2%*. Detikjatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7367715/simulasi-pilwali-surabaya-eri-armuji-39-7-ahmad-dhani-bayu-airlangga-28-2>

¹⁰ Kurniawan, R. A. (2024). *Calon Tunggal Eri Cahyadi-Armuji Menang Telak di Pilwalkot Surabaya 2024, Raih 84% Suara*. Radarsurabaya. <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/775362343/calon-tunggal-eri-cahyadi-armuji-menang-telak-di-pilwalkot-surabaya-2024-raih-84-suara>

akan melawan. Jumlah suara yang besar dapat didapatkan juga tentu datang dari tidak adanya perlawanan dari pasangan calon yang lain dan hanya melawan kotak kosong. Menjadi petahana tidak dapat dikatakan secara mutlak sebagai faktor utama dalam kemenangan karena masih ada masyarakat yang memilih kotak kosong saat pemilihan¹¹.

2. Krisis Demokrasi Lokal Akibat Disfungsi Partai Politik

Fenomena pengusungan Eri-Armuji yang didukung oleh 18 partai politik secara penuh mengantarkan pada kegagalan demokrasi lokal. Partai politik menjadi salah satu pondasi dalam berjalannya demokrasi di suatu negara dan diciptakan dengan tugas, pokok, dan fungsinya tersendiri. Solidaritas yang dimiliki oleh para pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Politik Surabaya ketika mengusung calon tunggal bukan merupakan suatu apresiasi tetapi menjadi titik degradasi demokrasi lokal. Hadirnya berbagai macam partai politik dengan visi misi serta ideologinya memperlihatkan bahwa mereka berdiri secara mandiri, memiliki tujuannya masing-masing dan sangat berbeda. Tentu adanya keberagaman ini harus dijaga keharmonisannya tetapi tidak pada aspek elektoral yang menjadikan tidak adanya persaingan¹².

¹¹ Huda, A., Maksum, A., & Tawakkal, G. T. I. (2024). Kebertahanan Petahanan dalam Menjaga Pencalonan Pilkada Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Transformativa*, 10(2), 220-236. <https://doi.org/10.21776/ub.transformativa.2024.010.02.4>

¹² Danuwidjaja, A. F., & Firman, M. (2023). Hubungan Antara Kaderisasi Dan Ideologi Dalam Partai Politik: Studi Kasus Aktivitas Internal Pdp. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1), 41-51. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.119>

Ketika partai politik tidak menjalankan fungsinya maka berbagai macam dampak negative terjadi baik dalam jangka pendek maupun panjang. Salah satunya pada fungsi yang paling utama yaitu sebagai representasi rakyat perihal kepentingan yang diperjuangkan. Adanya fenomena partai politik hanya dipergunakan sebagai 'alat transaksional' dimana mempermudah pada elitis untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga partai politik tidak lagi menjadi 'tangan rakyat'¹³. Hal ini acapkali terjadi karena tidak adanya pondasi atau kesadaran yang kuat dalam pengurus partai untuk menjalankan mandat rakyat, melainkan mereka lebih tunduk pada elit partai yang memiliki pengaruh besar.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka sangat berdampak pada partisipasi masyarakat yang menurun karena diiringi dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik yang tidak lagi menyampaikan aspirasi rakyatnya. Ketika dari akarnya 'partai politik' sudah tidak lagi menjalankan sosialisasi politik, rekrutmen, artikulasi kepentingan maka 'pohon' atau hasilnya berjalan mengikuti¹⁴. Kegagalan terjadi dalam tahap kepemimpinan partai dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, sehingga yang terjadi yaitu kegagalan demokrasi lokal. Dampak panjang yang akan terjadi yaitu pada fungsi partai politik

¹³ Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 4(2), 128-145. <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022>

¹⁴ Pattalangi, M. D., Oktareza, D., Andrean, F. W., & Elviandri, E. (2022). Aktualisasi Fungsi Partai Politik Terhadap Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal RECTUM*. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4772>

ini sendiri yang nantinya hanya digunakan sebagai kendaraan menuju parlemen atau lembaga legislatif dan calonnya tidak lagi merepresentasikan rakyat yang memilihnya. Sehingga masyarakat tidak mempercayai kinerja partai politik dan ketika fenomena ini terus dilanjutkan maka partai politik hanya dijadikan tempat pencucian uang, lubang untuk korupsi dan yang lainnya.

3. Penyimpangan dalam Demokrasi yang Diwajarkan

Berbagai macam penyimpangan dalam demokrasi yang menyebabkan kegagalan bahkan kemunduran, seakan permasalahan ini tidak memiliki solusi. Dapat dilihat di negara Indonesia terdapat berbagai macam penyelewengan seperti para elit penguasa yang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pemalsuan dan pembohongan terhadap publik atau masyarakat, Pemerintah membuat kebijakan yang hanya menguntungkan bagi para investor dan merugikan rakyat. Dengan adanya kerusakan pada sistem elektoral seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, seakan segala celah dalam demokrasi justru dimanfaatkan sebagai ladang bagi para oligarki untuk memperoleh manfaat bagi individu ataupun kelompok. Diiringi dengan tidak adanya aturan bagi para penyeleweng ini menjadikan semakin sering kejahatan dilakukan.

Di negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi juga didapati hal yang sama yaitu perusakan demokrasi yang disebabkan oleh penyelewengan dan dapat menyebabkan kemunduran demokrasi dalam negara tersebut. Perusakan ini dinilai memang sebagai kewajiban yang harus terjadi dalam sistem demokrasi, hal ini dapat ditarik lebih mendalam yaitu pada ideologi

sosialisme. Penyelewengan ini memang dibiarkan terjadi agar tidak muncul sosialisme, dimana adanya distribusi ekonomi yang adil karena adanya kepemilikan bersama atau secara kolektif. Dengan melihat di Indonesia dimana penyelewengan selalu terjadi bahkan sebelum kemerdekaan hingga saat ini, menimbulkan pertanyaan “mengapa hal ini dibiarkan?” dan jawabannya yaitu mengarah pada perang ideologi antara sosialisme dan kapitalisme dalam global.

Pertarungan ideologi antara kapitalisme dan sosialisme dalam aspek global ini tentu sangat berpengaruh dalam memahami fenomena penyelewengan dalam negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Menjalankan sistem demokrasi dalam perdebatan ideologi ini menempatkan diri dalam posisi yang netral sehingga dapat dipengaruhi oleh kedua ideologi yang sedang berperang ini. Adanya dominasi kapitalisme di Indonesia dapat menyebabkan hadirnya oligarki, adapun dampak dari dominasi sosialisme yaitu adanya klientelisme. Sehingga agar tidak menyebabkan ketimpangan dari kedua ideologi ini diciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam demokrasi seperti segala penyimpangannya dianggap biasa dan seakan tidak ada solusi meskipun itu merusak sistem demokrasi itu sendiri¹⁵.

4. Pandangan Islam Terhadap Seorang Pemimpin

Fenomena tidak adanya persaingan elektoral dalam Pilkada 2024 di Kota Surabaya menjadikan tidak adanya keadilan karena

¹⁵ Amelta, C., Putra, E., Agustina, M., Fikri, M., Pramana, I., Ardiansyah, V., & Hasibuan, H. A. (2024). Kemunduran Demokrasi Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Solusinya Di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1–8.

masyarakat merasa dengan adanya calon tunggal menjadikan masyarakat sepenuhnya tidak terwakili atau ter-representasikan. Sedangkan dalam Islam menjelaskan bahwa dalam setiap aspek seperti sosial, ekonomi, hukum, dan lainnya harus dilaksanakan secara adil. Pernyataan ini tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 8 dan Surat An-Nahl ayat 90 yang menyatakan mengenai perintah dalam menegakkan kebenaran dan berperilaku yang adil. Dengan segala hal yang menyimpang dari yang semestinya di Indonesia seperti praktik korupsi dan sebagainya menjadikan contoh nyata tidak adanya penerapan nilai Islam, terutama dalam perihal keadilan karena para elit mengambil hak-hak masyarakat yang tidak berdaya.

Dalam berjalannya suatu negara atau sistem tentu ada aturan dan figur pemimpin untuk memimpin jalannya negara dengan baik dan benar serta menjauhi penyimpangan. Segala fenomena yang terjadi dalam negara dapat dikontrol melalui pemimpinnya, seorang pemimpin harus membawa negara pada jalan yang benar dan adil. Dalam Islam pun telah dinyatakan secara jelas untuk kriteria dalam menjadi pemimpin. Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu (1) Jujur dan dapat dipercaya; (2) melaksanakan keadilan; (3) menjalankan musyawarah; (4) menganggap kepemimpinan sebagai amanah; (5) dapat melayani dan menjaga rakyat; (6) taat pada syariat; (7) tidak lalai dalam kekuasaan¹⁶. Sehingga seorang pemimpin harus bisa membawa kepentingan masyarakat yang beragam dan tetap adil pada semuanya.

¹⁶ Acim, S. A. (2018). Kriteria Pemimpin dalam Perspektif Hadits. *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 17(1), 115–162.

Tanggung jawab seorang pemimpin ada dua yaitu pada Allah dan rakyat yang dipimpinnya, sehingga pemimpin menjadi orang pertama yang akan dihisab di akhirat nanti. Mengingat tanggung jawab yang sangat besar karena telah diberikan kepercayaan atau amanah dari rakyatnya (orang yang memiliki beragam kepentingan dan hak). Ketika seorang pemimpin dengan amanah yang sangat besar maka ia harus menaati segala aturan yang tertuang dalam ajaran Islam serta senantiasa terus memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin¹⁷. Dengan begitu, pemimpin bisa menata negara dengan baik dan membawa prinsip keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat agar tidak merugikan masyarakat. Melihat banyaknya penyimpangan yang terjadi menjadi bukti nyata ketika pemimpin tidak memenuhi kriteria seorang pemimpin menurut Islam dan tidak menerapkan syariat atau ajaran didalamnya.

KESIMPULAN

Partai politik memiliki peran penting dalam berjalannya demokrasi, mengingat partai politik menjadi salah satu pondasi dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis. Partai politik tidak hanya menjadi kendaraan bagi para elit atau oligarki tetapi yang terutama harus merepresentasikan masyarakat secara keseluruhan. Partai politik memiliki kehadiran yang sangat esensial ketika menjadi penghubung antara masyarakat dan negara dalam

¹⁷ Fauzi, M., Harahap, M. I., & Nasution, M. R. (2024). Pemimpin Yang Adil Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Ayat-Ayat Kepemimpinan Menurut Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Sayyid Quthb). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 125-137. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3152>

segala aspek seperti salah satunya membantu masyarakat dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Di lain sisi partai politik wajib melaksanakan tugas dan fungsinya agar tidak disalahgunakan, melaksanakan kaderisasi dengan menggunakan nilai-nilai dan ideologi partai menjadi cara untuk mempertahankan legitimasi partai politik kedepannya.

Ketika partai politik tidak menjalankan fungsinya, salah satu dampak yang terjadi yaitu adanya kotak kosong dalam pemilihan seperti pada Pilkada 2024 di Surabaya. Partai politik tidak mencalonkan kadernya dan memilih untuk koalisi, hasil yang terjadi adanya calon tunggal dan didukung sepenuhnya oleh 18 partai politik. Hal ini tentu berdampak pada kemunduran demokrasi jika terus menerus terjadi, dalam penanganan masalah ini partai politik yang memegang kendali. Partai politik berjalan seperti yang seharusnya dan tidak malah menjadi alat bagi para elit, melalui pendalaman ideologis dan berpacu pada visi misi partai serta yang terutama menjaga netralitas partai politik (independensi). Ketika partai politik tidak menjalankan tugas dan fungsinya maka yang dapat terjadi seperti *money politics*, kotak kosong, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan yang lainnya. Sehingga penyimpangan tersebut yang menjadikan indeks atau nilai demokrasi terus menerus menurun tiap tahunnya, yang seharusnya mengalami peningkatan.

REFERENSI

- Acim, S. A. (2018). Kriteria Pemimpin dalam Perspektif Hadits. *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 17(1), 115–162.
- Amelta, C., Putra, E., Agustina, M., Fikri, M., Pramana, I., Ardiansyah, V., & Hasibuan, H. A. (2024). Kemunduran Demokrasi Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Solusinya Di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1–8.
- Azmi, F. (2024). *Simulasi Pilwali Surabaya: Eri-Armuji 39,7%, Ahmad Dhani-Bayu Airlangga 28,2%*. Detikjatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7367715/simulasi-pilwali-surabaya-eri-armuji-39-7-ahmad-dhani-bayu-airlangga-28-2>
- Danuwidjaja, A. F., & Firman, M. (2023). Hubungan Antara Kaderisasi Dan Ideologi Dalam Partai Politik: Studi Kasus Aktivitas Internal Pdip. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1), 41–51. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.119>
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fauzi, M., Harahap, M. I., & Nasution, M. R. (2024). Pemimpin Yang Adil Dalam Al-Qur’ān (Studi Komparasi Ayat-Ayat Kepemimpinan Menurut Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Sayyid Quthb). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 125–137. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3152>
- Irwanto, D., & Harirah MS, Z. (2023). Petahana vs Penantang: Studi Perbandingan Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2020. *Journal of Political Issues*, 4(2), 108–119. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.88>
- Jamil, D., Maksum, A., Sopyan, A. R., & Huda, A. (2024). Pelembagaan Partai Politik: Studi Kasus Partai Koalisi Incumbent Dalam

- Perebutan Kekuasaan Di Pilkada. *Jurnal Dinamika*, 5(1), 45–62. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v5i1.45-62>
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 4(2), 128–145. <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022>
- Kurniawan, R. A. (2024). *Calon Tunggal Eri Cahyadi-Armuji Menang Telak di Pilwalkot Surabaya 2024, Raih 84% Suara*. Radarsurabaya. https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/775362343/calon-tunggal-eri-cahyadi-armuji-menang-telak-di-pilwalkot-surabaya-2024-raih-84-suara?utm_source=chatgpt.com
- Pattalongi, M. D., Oktareza, D., Andrean, F. W., & Elviandri, E. (2022). Aktualisasi Fungsi Partai Politik Terhadap Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal RECTUM*. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4772>
- Sartori, G. (1977). Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. In *The Western Political Quarterly* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/447948>
- Setiawan, A. D., & Hartik, A. (2024). *Semua Partai Dukung Eri-Armuji, Pakar: Pilkada Surabaya "Selesai."* DetikNews. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/09/02/124433678/semua-partai-dukung-eri-armuji-pakar-pilkada-surabaya-selesai>
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik* (D. Herfan & A. Fajar (eds.); 10th ed.). PT Grasindo.
- Widiyana, E. (2024). *Eri-Armuji Resmi Daftar Pilwalkot Surabaya, Didukung 18 Parpol*. DetikNews. <https://news.detik.com/pilkada/d-7512915/eri-armuji-resmi-daftar-pilwalkot-surabaya-didukung-18-parpol>